



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

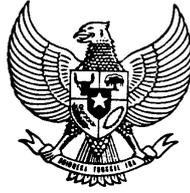
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 9 MEI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 523, Pasal 284, Pasal 488, Pasal 502, dan Pasal 521 sepanjang frasa *huruf j*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Heriyanto
2. Ramdansyah

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Kamis, 9 Mei 2019, Pukul 13.11 – 13.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Ramdansyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sidang dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019 dalam Sidang Pendahuluan Perbaikan Permohonan, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, yang hadir siapa?

**2. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Yang hadir Pemohon II, Yang Mulia. Pemohon I tidak bisa hadir, tapi sudah dikirimkan surat terkait dengan tugas, dia ada di daerah, Yang Mulia.

Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Saudara sudah memperbaiki Permohonannya?

**4. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Sudah, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, tidak usah disampaikan secara keseluruhan. Pokok-pokok perubahannya saja yang Anda sampaikan, ya, tapi nanti Petitumnya disampaikan secara keseluruhan. Silakan.

**6. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

Pertama, terkait perubahan Legal Standing, Yang Mulia. Kemarin Pemohon I Heriyanto dan kemudian saya sendiri, Pemohon II menggunakan Legal Standing sebagai advokat. Kemudian, kami merasa ini ada ... setelah diskusi, kemudian kami ganti dengan ... sebagai Pemohon ini ... sebagai pemerhati masalah pemilu, Yang Mulia.

Kemudian, ada beberapa landasan karena (...)

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, Saudara menguraikan bahwa Saudara kenapa punya Legal Standing? Karena pemerhati pemilu?

**8. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Betul, Yang Mulia. Dan (...)

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Terus?

**10. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Di sini kami sebutkan juga, Pemohon I dan Pemohon II (saya) beberapa kali memenangkan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**12. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Yang kedua, untuk membuat secara ... apa ... urutan pasal per pasal.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**14. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Jadi, kemudian kami urutan Pasal 28 ... Pasal 284 yang awalnya tadi (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu anu ya, dasar pengujiannya diurutkan.

**16. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus? Yang diujikan masih sama? Pasal berapa?

**18. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Setelah kami diskusi, tetap, Yang Mulia. Ada Pasal 284, kemudian Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, dan pasal (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi anu ... dianu ya, diurutkan?

**20. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Sudah diurutkan, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Pasal 488-nya ditaruh setelah Pasal 474 ayat (1) berarti?

**22. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Ini karena kemarin (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Atau urutan anu ... isunya?

**24. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Isunya, Yang Mulia. Salah rujuk, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, ya, isunya kalau gitu, Anda menurut isunya, ya. Terus?

**26. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Terakhir, lebih kepada Petikum nanti, Yang Mulia, yang saya bacakan.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**28. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Baik, Yang Mulia, saya bacakan.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Positanya Anda perbaiki?

**30. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Tidak, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak?

**32. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Ya, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**34. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Jadi, setelah kami rapat by phone, Yang Mulia, kemudian kami tetap. Walaupun ada ... ada katakanlah dalam peraturan MK yang menyatakan Pasal 6 ayat (2) terkait dengan ... apa ... harus izin ketua umum dan sekjen, itu kemudian tidak (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bukan harus izin, harus ditandatangani itu!

**36. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Harus ditandatangani ketum, sekjen (...)

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**38. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Tapi kami merasa (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Atau istilah lain, ya, kan ada partai yang (...)

**40. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak menggunakan istilah *ketua umum* dan *sekjen*, tapi *presiden*, kan itu ada.

**42. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Terus, gimana?

**44. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Tetap kami menganggap itu ada persoalan, sehingga kemudian kami tetap menggunakan (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi persoalannya, apakah di undang-undang itu?

**46. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Persoalannya di ... di peraturan MK menurut kami berdua, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya.

**48. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Tapi, tetap kami ingin sampaikan bahwa ini mohon pertimbangan Hakim Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Ya, silakan.

**50. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Untuk Petitum, saya bacakan, Yang Mulia?

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**52. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 284 undang-undang a quo tentang Pemilu konstitusional sepanjang dimaknai dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan, atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
  - a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
  - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu, sehingga suara ... suara yang tidak sah.
  - c. Memilih pasangan calon tertentu.
  - d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu.
  - e. Memilih calon anggota DPR tertentu. Dan atau
  - f. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
3. Menyatakan Pasal 473 ayat (2) undang-undang a quo konstitusional sepanjang dimaknai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi:

- a. Penetapan perolehan suara partai politik.
  - b. Penetapan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas 4%.
  - c. Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Dan
  - d. Penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih.
4. Menyatakan Pasal 474 ayat (1) undang-undang a quo konstitusional sepanjang dimaknai dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
  5. Menyatakan Pasal 488 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai merujuk pada Pasal 202, sehingga Pasal 484 berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda Rp12.000.000,00.
  6. Menyatakan Pasal 502 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  7. Menyatakan Pasal 516 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  8. Menyatakan Pasal 523 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai merujuk pada Pasal 284, sehingga Pasal 523 berbunyi, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.
  9. Menyatakan Pasal 521 sepanjang frasa kata *huruf j* undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik.

Hormat Pemohon, Heriyanto, S.H., M.H., ditandatangani dan Ramdansyah, S.H., ditandatangani. Demikian, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ada yang akan disampaikan Pak Hartoyo? Cukup. Prof. Enny? Cukup? Ya, baik.

Saudara juga mengirim ini, surat ini apa artinya ini? Badan Pemenangan Nasional yang menugaskan Marta dan Heriyanto ini disampaikan ke sini?

**54. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Baik, Yang Mulia. Itu terkait dengan ketidakhadiran Pemohon I yang hari ini masih ... masih mengurus C-1 di Jawa Timur, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, gitu. Kayaknya ndak ada kaitannya dengan sini ini. Yalah, sudah, nanti kita pertimbangkan.

**56. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2, ya?

**58. PEMOHON: RAMDANSYAH**

P-1 dan P-2, Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak ada yang lain?

**60. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Tidak ada, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi Saudara mengatakan, "Selanjutnya disebut Bukti P-1." Itu apa itu? (...)

**62. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak toh.

**64. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Ada (...)

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

"Selanjutnya disebut Pemohon ... Bukti P-1." Di dalam Permohonan Saudara, coba dibaca!

**66. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Yang halaman pertama.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

He em.

**68. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Bukti P-1). Halaman pertama, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik kalau begitu. Ada lagi yang akan disampaikan?

**70. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Cukup, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, ya.

Baik, Pak Hartoyo sudah enggak ada? Prof. Enny? Cukup, ya?

Baik, kalau begitu, Sidang Pendahuluan Perbaikan Permohonan, kita sahkan dulu sebelum saya akhiri. Saya akan mengesahkan Bukti P-1 sama P-2, ya. Disahkan

**KETUK PALU 1X**

**72. PEMOHON: RAMDANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau sudah tidak ada yang akan dikemukakan, sidang sudah cukup dan dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB**

Jakarta, 9 Mei 2019  
Panitera,  
t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001